

KOORDINASI PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH

Wisnu Wicaksono

NPP. 30.0731

Asdaf Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah

Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah

Email: wisnuwicaksono52@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dra. Hj. Riza Risyanti, M.Si.

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The author focuses on problems in the Musrenbang of Wonosobo Regency in 2022, where there are more proposals that do not match the regional development priorities of Wonosobo Regency and several regional apparatuses in Wonosobo Regency are unable to achieve the performance targets set with regional development priorities. **Purpose:** The aim of this study is to determine the coordination of the preparation of the Regional Government Work Plan for Wonosobo Regency, Central Java Province. **Method:** This study uses a qualitative approach with a descriptive method through an inductive approach to the concept of coordination according to Hasan and Eviany's Theory. Data collection techniques were carried out by interviewing 11 informants, participant observation, and documentation. **Result:** The findings obtained by the authors in this study are that the coordination of the preparation of the Regional Government Work Plan at the Regional Development Planning Agency (Bappeda) of Wonosobo Regency, Central Java Province is quite good, although further handling of the next coordination process is still needed. **Conclusion:** Coordination of the preparation of the Regional Government Work Plan at the Regional Development Planning Agency (Bappeda) Wonosobo Regency, Central Java Province has been going well, this is due to the ease of obtaining information, ease of communication, use and means of information technology, the activeness of regional apparatuses, the obedience of regional apparatuses, competent leaders, agenda setting, forms of agreement and commitment, sanctions for violators of agreements, incentives for coordinating implementers.

Keywords: Coordination; Preparation of Regional Government Work Plans; Regional development.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan dalam Musrenbang Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 lebih banyak usulan yang tidak sesuai prioritas pembangunan daerah Kabupaten Wonosobo dan beberapa perangkat daerah di Kabupaten Wonosobo tidak mampu mencapai target kinerja yang telah ditentukan dengan prioritas pembangunan daerah. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui koordinasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui pendekatan induktif terhadap konsep koordinasi menurut

Teori Hasan dan Eviany. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terhadap 11 informan, observasi berperan serta, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu koordinasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah cukup baik, walaupun masih diperlukan adanya penangan lebih lanjut terhadap proses koordinasi selanjutnya. **Kesimpulan:** Koordinasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah telah berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan adanya kemudahan mendapat informasi, kemudahan komunikasi, penggunaan dan sarana teknologi informasi, keaktifan perangkat daerah, ketaatan perangkat daerah, *leader* yang kompeten, agenda *setting*, bentuk kesepakatan dan komitmen, sanksi bagi pelanggaran kesepakatan, insentif bagi pelaksana koordinasi.

Kata kunci: Koordinasi; Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Pembangunan Daerah

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah melalui desentralisasi tanpa mencampuri urusan absolut diharapkan dapat mempercepat dan menyederhanakan pembangunan di Indonesia melalui pengambilan keputusan-keputusan terkait kebijakan mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan penyediaan pelayanan publik.

Suatu pembangunan memerlukan adanya perencanaan yang efektif. Perencanaan pembangunan baik nasional maupun daerah berguna untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah sehingga proses pembangunan nasional secara keseluruhan menjadi semakin terpadu dan dapat bertumbuh dengan cepat dan efisien (Sjafrizal, 2016). Turunan dari perencanaan pembangunan nasional adalah perencanaan pembangunan daerah. Pembangunan tersebut dilaksanakan oleh pemerintah daerah berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing perangkat daerah yang pelaksanaannya mengacu kepada tujuan, kondisi, dan potensi yang dimiliki oleh daerahnya serta disesuaikan dengan visi misi daerahnya.

Perencanaan pembangunan daerah disusun berjangka. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 perencanaan pembangunan daerah dibagi menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan perencanaan untuk 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan perencanaan untuk 5 tahun, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan untuk 1 tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan, rencana kerja beserta pendanaannya yang dilakukan baik langsung oleh pemerintah daerah maupun dengan partisipasi masyarakat. RKPD disusun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah. Pelaksana dari sebuah perencanaan pembangunan daerah adalah perangkat daerah.

Koordinasi yaitu salah satu cara untuk mempersatukan usaha dari setiap perangkat daerah yang ada. Tujuannya agar pembangunan daerah sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan dan dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi guna mencapai tujuan organisasi secara efisien (Handoko, 2016).

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu perangkat daerah yang bertugas dalam menyelenggarakan aktivitas pelibatan segenap pihak yang terkait/mengkoordinasikan bersama perangkat daerah Kabupaten Wonosobo yang

lain di dalam proses perencanaan pembangunan daerah demi mewujudkan tujuan pembangunan yang akan ditetapkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Kurang bagusnya koordinasi perangkat daerah dalam penyusunan RKPD Kabupaten Wonosobo. Dibuktikan dengan usulan dalam Musrenbang Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 masih lebih banyak yang belum sesuai dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Wonosobo. Adanya data hasil rekapan Musrenbang Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 menginformasikan dimana total usulan dari 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Wonosobo, hasilnya belum baik karena masih lebih banyak usulan yang belum sesuai dengan prioritas daerah. Dari total sebanyak 255 usulan yang disampaikan dalam Musrenbang Kabupaten Wonosobo, hanya 112 usulan yang terakomodir dan sisanya yang lebih banyak yakni sebanyak 143 usulan tidak terakomodir.

Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai tema pembangunan daerah di Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah pada tiap tahunnya menjadikan Musrenbang Kabupaten Wonosobo hanya dianggap sebagai formalitas oleh masyarakat karena belum mampu menampung usulan-usulan mereka. Hal itu karena masyarakat cenderung mengusulkan aspirasi terkait pembangunan infrastruktur sedangkan tiap tahunnya prioritas pembangunan di Kabupaten Wonosobo berbeda-beda. Akibatnya di masyarakat muncul rasa apatis untuk mengusulkan usulannya kembali.

Pelaksana pembangunan daerah adalah perangkat daerah. Namun, di Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan pembangunan daerahnya masih terdapat beberapa perangkat daerah yang tidak mencapai target indikator kinerja yang telah ditentukan. Salah satu contohnya adalah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Wonosobo. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya nilai kinerja dengan kategori “Sangat Rendah/SR” pada dinas tersebut. Padahal urusan pendidikan menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah Kabupaten Wonosobo yang telah diusung dalam visi misi kepala daerahnya.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, yang pertama Skripsi Muhammad Khairul Anwar pada tahun 2016 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Mulawarman berjudul “Fungsi Pengkoordinasian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam Perencanaan Kota Samarinda” yang menggambarkan tentang penyelenggaraan koordinasi Bappeda dengan Perangkat Daerah dalam melakukan perencanaan pembangunan Kota Samarinda. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan analisis data yang digunakan yaitu Analisis Data Kualitatif Model Interaktif Miles, Huberman, dan Johnny. Untuk teknik pengumpulan datanya yakni dengan menganalisis dan mengkonstruksi kepustakaan, observasi, dan wawancara. Narasumbernya yakni pejabat yang terkait dalam penelitian ini antara lain Kepala Bappeda Kota Samarinda, Sekretariat Bappeda, dan Kepala Bidang Perencanaan Program. Landasan teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu konsep koordinasi, perencanaan pembangunan, konsep pembangunan, dan konsep Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Kedua, Skripsi Nugraha Eka Prayudha pada tahun 2017 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung dengan judul “Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat” yang menggambarkan tentang peran Bappeda dalam pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitiannya deskriptif. Untuk teknik pengumpulan datanya yaitu dengan menganalisis dan mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih luas melalui penelitian langsung dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Landasan teori yang

digunakan pada penelitian ini yaitu konsep Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, konsep pemerintah daerah, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Bappeda, serta konsep Pembangunan Daerah. Ketiga, Jurnal Kasmil tahun 2018 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Administrasi Publik Universitas Kendari dengan judul “Pelaksanaan Fungsi Koordinasi dalam Menunjang Pelaksanaan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari” yang menggambarkan pelaksanaan koordinasi pada kantor Bappeda Kota Kendari. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan sebagai penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan datanya yakni melalui cara studi kepustakaan, studi lapangan, observasi, dan wawancara dengan Kepala Bappeda, Sekretaris Bappeda, Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Bidang Sosial Budaya dan Pembangunan Manusia, Camat, Lurah, dan Pegawai di lingkungan Bappeda.

Keempat, Skripsi Sitti Avania Rizki pada tahun 2018 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Indonesia berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Dalam Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat” yang menggambarkan efektivitas pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan metode *post positivist* dengan jenis penelitian deskriptif. Untuk teknik pengumpulan datanya yakni dengan wawancara mendalam dan studi literatur. Narasumbernya yakni pejabat yang terkait dalam penelitian ini antara lain pegawai Bappeda Kota Bekasi, Kasi Kecamatan Bekasi Selatan, dan Kasi Kelurahan Kota Baru Kecamatan Bekasi Barat. Landasan teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu konsep perencanaan, perencanaan pembangunan, perencanaan pembangunan regional, dan efektivitas.

Dan yang kelima, Skripsi Neli Haryanti pada tahun 2019 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Indonesia berjudul “Pelaksanaan Koordinasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Depok” yang menggambarkan pelaksanaan koordinasi serta faktor yang mempengaruhi pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah oleh Bappeda Kota Depok. Penelitian ini menggunakan metode *post positivist* dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam dengan Bappeda Kota Depok, Dinas Pendidikan Kota Depok, dan Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Depok, dokumentasi, dan Studi Pustaka.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni koordinasi penyusunan rencana kerja pemerintah daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah, metodenya yang digunakan juga berbeda dengan penelitian Anwar, Eka Nugraha, Kasmil, Sitti, dan Neli. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Hasan dan Eviany (Hasan dan Eviany, 2014) yang menyatakan bahwa koordinasi dapat diukur melalui komponen informasi, komunikasi, dan teknologi informasi, kesadaran dan pemahaman pentingnya berkoordinasi, wadah untuk menampung aspirasi, kesepakatan dan komitmen, MoU penetapan kebijakan, insentif koordinasi, dan *feedback*.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan koordinasi, faktor penghambat, dan upaya mengatasi faktor penghambat dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui pendekatan induktif. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan suatu gejala peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo lalu di analisis menggunakan pendekatan induktif dengan ditarik kesimpulan setelah data dikumpulkan dan di observasi terlebih dahulu (Moloeng, 2014).

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 11 orang informan yang terdiri dari Kepala Bappeda Kabupaten Wonosobo (1 orang), Sekretaris Bappeda Kabupaten Wonosobo (1 orang), Kabid Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, Penelitian, dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Wonosobo (1 orang), Kabid Ekonomi Bappeda Kabupaten Wonosobo (1 orang), Kabid Pemerintahan, Sosial, dan Budaya Bappeda Kabupaten Wonosobo (1 orang), Kabid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Kabupaten Wonosobo (1 orang), Kadin Disdikpora Kabupaten Wonosobo (1 orang), Camat dan Lurah Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo (2 orang), dan Camat dan Lurah Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo (2 orang). Adapun analisisnya menggunakan teori koordinasi yang digagas oleh Hasan dan Eviany (Hasan dan Eviany, 2014) yang menyatakan bahwa koordinasi dapat diukur melalui tujuh komponen, yaitu tersedianya informasi, komunikasi, dan teknologi informasi, kesadaran dan pemahaman pentingnya berkoordinasi, wadah untuk menampung aspirasi, kesepakatan dan komitmen, MoU penetapan kebijakan, insentif koordinasi, dan *feedback*.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis koordinasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah menggunakan pendapat dari Hasan dan Eviany yang menyatakan bahwa bahwa koordinasi dapat diukur melalui tujuh komponen, yaitu tersedianya informasi, komunikasi, dan teknologi informasi, kesadaran dan pemahaman pentingnya berkoordinasi, wadah untuk menampung aspirasi, kesepakatan dan komitmen, MoU penetapan kebijakan, insentif koordinasi, dan *feedback*.

3.1. Dimensi Informasi, Komunikasi, dan Teknologi

Dimensi ini berfokus pada sarana dalam berkoordinasi saat penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo dan terbagi menjadi 3 indikator yakni kemudahan akses informasi, kemudahan komunikasi, dan kemudahan teknologi informasi. Dimensi ini menjadi dasar dalam pelaksanaan koordinasi sehingga koordinasi dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat terlaksana. Di Kabupaten Wonosobo terdapat kemudahan akses informasi yang berguna dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Wonosobo yakni melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Kab. Wonosobo, dan akses informasi capaian kerja perangkat daerah dalam melaksanakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo melalui aplikasi “Gardu Perencanaan Kab. Wonosobo” serta akses informasi terkait Musrenbang Kabupaten Wonosobo dan formulir absen kehadiran pada saat Musrenbang dan penyampaian usulan yang ditujukan untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Terdapat juga komunikasi antara Bappeda Kab. Wonosobo dengan setiap perangkat daerah di Kab. Wonosobo. Komunikasi tersebut adalah proses yang menentukan isu apa yang penting dan menjadi prioritas serta landasan dalam dibuatnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Wonosobo. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya Forum Konsultasi Publik (FKP) antara Bappeda Kab. Wonosobo dengan seluruh perangkat daerah yang ada di Kab. Wonosobo. Dimana pada proses tersebut terdapat penentuan arah kebijakan dan

prioritas pembangunan RKPD Kab. Wonosobo Tahun 2024 yang dipaparkan pada saat pembahasan dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo. Terdapat juga ketersediaan fasilitas teknologi informasi serta fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan oleh para pegawai di kantor Bappeda Kabupaten Wonosobo. Fasilitas tersebut antara lain: Laptop (7 buah), Komputer (5 buah), *Printer & Scan* (4 buah), *Wifi Router* (3 buah), *Smartboard* (1 buah), Proyektor (1 buah), dan seperangkat *speaker & mic* (1 buah). Di temukan juga adanya undangan terbuka mengenai acara Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang Kab. Wonosobo Tahun 2022 yang dapat menjadi bukti bahwa pada saat penyusunan RKPD Kab. Wonosobo terdapat kemudahan teknologi informasi.

3.2. Dimensi Kesadaran dan Pemahaman Pentingnya Koordinasi

Dimensi kesadaran dan pemahaman pentingnya koordinasi merupakan dimensi yang memengaruhi hasil koordinasi. Dimensi ini berkaitan dengan pengetahuan dan ketaatan pelaksana koordinasi dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Wonosobo. Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo, perangkat daerah sudah memiliki pengetahuan yang cukup tentang koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang akan memengaruhi cara berpikir dan bertindak pelaksana koordinasi terhadap permasalahan yang dihadapi untuk kemudian diusulkan dan diselesaikan melalui sebuah usulan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perangkat daerah di Kabupaten Wonosobo dengan aktif akan membahas dan mengusulkan aspirasi untuk kemudian dapat diselesaikan melalui sebuah Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Wonosobo. Hal tersebut dapat dilihat melalui daftar peserta yang menghadiri Musrenbang Kabupaten Wonosobo. Setiap perangkat daerah di Kabupaten Wonosobo sudah memiliki acuan dalam membuat usulan yang akan disampaikan pada saat penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo. Ketaatan pelaksana koordinasi terhadap hasil koordinasi berkaitan dengan usulan yang disampaikan pada sebuah Rencana Kerja Pemerintah Daerah searah dengan visi misi dan dokumen perencanaan atau tidak. Beberapa usulan perangkat daerah di Kabupaten Wonosobo sudah selaras dengan acuannya. Hal tersebut dikarenakan para perangkat daerah melaksanakan forum konsultasi publik (FKP) dalam rangka persiapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo. Selain itu juga beberapa pelaksana koordinasi memiliki cara tersendiri dalam menyusun dan menyiapkan usulan yang akan disampaikan pada saat pelaksanaan Musrenbang. Meskipun sudah ada pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP), dan Musrenbang Kab. Wonosobo yang mengarahkan setiap perangkat daerah agar sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Namun di beberapa perangkat daerah salah satunya Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kab. Wonosobo masih terdapat indikator kinerja yang tidak tercapai. Hal tersebut memerlukan adanya peran konsolidator dari Bappeda Kab. Wonosobo yang fungsi untuk menelaah permasalahan yang menyebabkan kinerja perangkat daerah tersebut tidak tercapai. Konsolidator tersebutlah yang nantinya akan berdiskusi dengan koordinator Rencana Kerja (Renja) dari Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kab. Wonosobo untuk menaikkan kinerjanya agar dapat tercapai sesuai dengan target.

3.3. Dimensi Wadah untuk Menampung Aspirasi

Dalam penyusunan RKPD Kab. Wonosobo, Forum Komunikasi Publik dan Musrenbang Kabupaten Wonosobo merupakan wadah untuk menampung aspirasi. Akan tetapi, dimensi wadah untuk menampung aspirasi yang dimaksud di sini adalah yang berkaitan dengan indikator *leader* yang berkompeten sehingga mampu berperan dalam menampung serta membahas aspirasi yang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah. Dimensi ini juga berkaitan dengan indikator agenda *setting* dalam melakukan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Peran seorang *leader* yang berkompeten diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo. Hal tersebut karena seorang *leader* dari perangkat daerah harus mampu

menampung, membahas, dan menggerakkan aspirasi yang muncul kepadanya. Baik dari internal organisasinya maupun dari masyarakat secara langsung. Hal tersebut tidak lepas dari sebuah ide. Seorang yang berkompeten akan dengan mudah menganalisis berbagai permasalahan yang dihadapi. Dengan begitu maka *leader* tersebut akan menggerakkan segala kemampuannya untuk memunculkan ide-ide dalam menampung, membahas, dan menyalurkan aspirasi yang ada. Perangkat daerah Kab. Wonosobo memiliki peran dan cara tersendiri dalam menampung serta menyalurkan aspirasi. Hal itu menandakan adanya indikator *leader* yang berkompeten di Kabupaten Wonosobo. Karena dari total usulan yang masuk, kenyataannya lebih banyak usulan yang terakomodasi dibandingkan dengan usulan yang tidak terakomodasi. Usulan-usulan tersebut masuk dari berbagai cara pendekatan. Dari pendekatan *bottom-up/top-down*, partisipatif, dan politik. Di Kabupaten Wonosobo juga terdapat agenda *setting* dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Agenda *setting* penting karena hal tersebut yang dijadikan sebagai kalender yang akan diikuti oleh semua perangkat daerah di Kabupaten Wonosobo.

3.4. Dimensi Kesepakatan dan Komitmen

Dimensi kesepakatan dan komitmen berfokus pada hasil yang berbentuk kesepakatan dan komitmen pada sebuah proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Kesepakatan dan komitmen adalah hasil dari sebuah proses koordinasi. Apabila berbagai pihak saling mengkomunikasikan maksud dan tujuannya maka akan membentuk sebuah kesepakatan dan komitmen yang menjadi dasar teknis dalam melaksanakan tugas oleh setiap perangkat daerah. terdapat bentuk kesepakatan dan komitmen pada penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Kabupaten Wonosobo sehingga target-target pembangunan yang akan dicapai dapat terealisasi dengan capaian kinerja program dari perangkat daerah terkait. Sebagai contoh yakni Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Wonosobo melalui evaluasi kinerjanya dapat meraih status capaian sangat tinggi. Hal tersebut menunjukkan adanya kesepakatan dan komitmen terhadap arah program unggulan Kabupaten Wonosobo dalam bidang pendidikan yakni “WONOSOBO *PINTER*” yang direalisasikan oleh Disdikpora Kab. Wonosobo.

3.5. Dimensi MoU Penetapan Kebijakan

Dimensi MoU penetapan kebijakan berfokus pada persetujuan dari berbagai perangkat daerah dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. MoU disini dapat berupa persetujuan dengan bentuk langsung maupun tidak secara langsung. Persetujuan ini bertujuan untuk mencapai kepentingan bersama melalui sebuah Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan disesuaikan kemampuan dan kebutuhan dari setiap perangkat daerah yang akan diturunkan menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah. Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Wonosobo memiliki suatu kesepakatan dengan perangkat daerah dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang dituangkan dalam arah prioritas pembangunan melalui penentuan strategi pencapaian kinerja pertahun dari setiap perangkat daerah yang dikoordinir oleh Bappeda Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah.

3.6. Dimensi Insentif Koordinasi

Insentif koordinasi yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan sanksi bagi pelanggar kesepakatan serta tanda jasa bagi pelaksana koordinasi. Sanksi dalam pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Wonosobo oleh perangkat daerah tidak merujuk kepada sebuah *punishment* (hukuman) tapi Bappeda lebih mengambil tindakan untuk melihat kinerja perangkat daerah dalam pelaksanaan RKPD beserta pencapaian targetnya kemudian menganalisis permasalahan apa yang menyebabkan perangkat daerah tidak mencapai target pelaksanaan RKPD. Insentif dalam pelaksanaan koordinasi

dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo tidak berbentuk *reward* (hadiah) secara langsung tapi lebih mengarah kepada penghargaan apresiasi pimpinan Bappeda kepada perangkat daerah yang sesuai atau mampu mencapai target RKPD dalam kinerjanya.

3.7. Dimensi *Feedback*

Dimensi *feedback* berfokus pada tahapan pasca Musrenbang RKPD dan evaluasi pelaksanaan RKPD di Kabupaten Wonosobo. Adanya evaluasi tentu akan berpengaruh kepada kinerja perangkat daerah dalam pelaksanaan RKPD. Dimensi *feedback* dibagi menjadi satu indikator saja yaitu adanya umpan balik terhadap proses koordinasi selanjutnya. Evaluasi RKPD di Kabupaten Wonosobo tahun 2023 merupakan tahun pertama dari implementasi aplikasi “Gardu Perencanaan”. Meski proses evaluasi RKPD sudah ada namun belum dapat dikatakan efektif atau tidak karena pada tahun 2023 merupakan tahun pertama pelaksanaan evaluasi dengan penggunaan aplikasi “Gardu Perencanaan” yang merupakan sumber data terkait kinerja perangkat daerah dalam pelaksanaan rencana kerjanya untuk mencapai target RKPD Kab. Wonosobo.

3.8. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Kelima penelitian di atas menggambarkan bagaimana hasil pembangunan daerah yang dilakukan oleh Bappeda terkait program kerja yang telah disusun. Dalam penelitian tersebut menunjukkan bagaimana proses perencanaan dijalankan dalam mencapai pembangunan daerah serta peran dari Bappeda yang berfungsi sebagai koordinator dalam melaksanakan pembangunan daerah. Dari tinjauan pustaka di atas, maka dapat digambarkan beberapa persamaan dan perbedaannya. Persamaan penelitian ini dengan tinjauan pustaka adalah berfokus pada perencanaan pembangunan daerah.

Untuk perbedaan antara penelitian ini dengan tinjauan pustaka adalah cara dalam mewujudkan pembangunan daerah. Pada penelitian ini lebih difokuskan untuk menganalisa secara deskriptif koordinasi, dan faktor yang memengaruhi koordinasi, serta upaya-upaya dalam koordinasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Bappeda Kabupaten Wonosobo. Sedangkan, pada tinjauan pustaka menjelaskan pembangunan daerah yang berfokus pada analisis bentuk pembangunan daerah, peran Bappeda dan instansi terkait dalam menjalankan perencanaan pembangunan daerah.

Adanya persamaan dan perbedaan pada penelitian ini dengan tinjauan pustaka membawa konsekuensi pada hasil penelitian. Jika pada hasil-hasil tinjauan pustaka ditujukan untuk memperoleh gambaran/deskriptif variabel itu sendiri (variabel pembangunan daerah) beserta indikator-indikator dilingkup organisasi pemerintah, maka pada penelitian ini diharapkan untuk menggambarkan tentang bagaimana koordinasi, dan faktor yang memengaruhi koordinasi, serta upaya-upaya dalam koordinasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Bappeda Kabupaten Wonosobo.

3.9. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Penulis menemukan faktor penghambat koordinasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah yakni Keterbatasan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo, dan Perbedaan Tema Pembangunan Daerah Kab. Wonosobo Pada Tiap Tahunnya. Selain itu, ditemukan adanya upaya dalam mengatasi hambatan tersebut yakni melalui evaluasi perencanaan pembangunan Kab. Wonosobo melalui “Gardu Perencanaan Kab. Wonosobo” dan sosialisasi / penyuluhan terhadap masyarakat Kabupaten Wonosobo.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah cukup

baik. Hal tersebut dibuktikan dengan terpenuhinya indikator pada enam dimensi yakni tersedianya informasi, komunikasi, dan teknologi informasi, kesadaran dan pemahaman pentingnya berkoordinasi, wadah untuk menampung aspirasi, kesepakatan dan komitmen, MoU penetapan kebijakan, dan insentif koordinasi, Namun, dalam dimensi feedback yaitu pada indikator adanya umpan balik terhadap proses koordinasi selanjutnya diperlukan adanya penanganan lebih lanjut sehingga dimensi feedback tidak terpenuhi.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kabupaten dan pada beberapa perangkat daerah yang ada di Kabupaten Wonosobo saja sebagai informan yang dipilih berdasarkan pendapat (Sugiyono, 2019).

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan koordinasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Bappeda Kabupaten Wonosobo, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo, Kecamatan Kertek, Kelurahan Kertek, Kecamatan Wonosobo, dan Kelurahan Wonosobo Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Handoko, T.Hani. (2016). *Manajemen: Edisi Kedua*, Yogyakarta: BFE

Hasan, E & Eviany, E. (2014). *Komunikasi Dalam Koordinasi Pemerintahan*. Bandung: IPDN Press

Moloeng, Lexy J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Sjafrizal. (2016). *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta

Jurnal/Artikel

Anwar, Khairul. (2016). *Fungsi Pengkoordinasian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam Perencanaan Kota Samarinda*.

Avania, Sitti. (2018). *Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.*

Lembaran Negara

Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421.

_____. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

_____. (2017). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312.

